MADANI
JURNAL POLITIK DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
(P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

Keterlibatan Masyarakat Desa Benteng Tado-Manggarai NTT Dalam Pemilu Bagi Kesejahteraan Sosio-Ekonomi Menurut Filsafat Politik Armada Riyanto

Mathias Jebaru Adon

Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang

mathiasjebaruadon@gmail.com

Adrianus Ranja

Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang

adrianus5792@gmail.com

Received: 01 November 2021; Revised: 10 Desember 2021; Accepted : 20 Desember 2021; Published : Desember 2021; Available online : Desember 2021.

Abstract

The focus of this study aims to explore the understanding of the people of Benteng Tado towards political democracy in Manggarai-Flores NTT. In particular, their involvement in the election of legislative candidates so that it can provide benefits for the welfare of socio-economic life. The methodology used in this study is a quantitative method. Data was collected through a questionnaire distributed via a google form. This research was carried out through critical analysis according to Armada Riyanto's political philosophy. Armada Riyanto's concept of politics as the governance of everyday life becomes the theoretical foundation in analyzing the involvement of the people of Benteng Tado in elections and their impact on socio-economic life. This study found that the understanding of the people of the Benteng Tado towards democracy was still limited to their involvement in the general election. In other words, the people of Bentang Tado do not understand that politics is a means to improve social welfare, especially post-election.

Keywords: Democracy, Politics, Elections, Socioeconomic welfare.

Pendahuluan

Demokrasi politik bukanlah hal baru di dalam penghayatan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan politik suatu negara. Akan tetapi dalam hal ini masyarakat diandaikan dilibatkan secara penuh di dalam menentukan kehidupannya sendiri. Masyarakat tidak hanya dilibatkan ketika pesta demokrasi rakyat, yang kadang-kadang lebih merupakan pesta milik politisi atau elit politik. Hal ini paling jelas ditemukan dalam dinamika hidup politik masyarakat Benteng Tado-Manggarai Flores, NTT

Dunia pengalaman masyarakat desa Benteng Tado yang digeluti dalam riset fenomenologis ini menjadi teks yang hidup. Dia berbicara tentang keterlibatan kesehariannya dalam urusan tata kelola hidup bersama, mengusahakan kesejahteraan dalam hidup berbangsa dan bernegara melalui keterlibatan dalam berpolitik. Keterlibatan itu dimungkinkan oleh sistem demokrasi dalam berpolitik. Uraian ini juga akan menampilkan dinamika hidup yang banyak berbicara mengenai peziarahan masyarakat dalam memaknai demokrasi ber-(politik). Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif menjadi salah satu cetusannya. Meski bukan satu-satunya.

Peziarahan keterlibatan masyarakat desa Benteng Tado dalam kehidupan politik menampilkan kisah tragis wajah dunia yang kerap ditinggalkan tanpa kabar pasca-pemilu. Keterpurukan societas dalam bidang sosial dan ekonomi mengeluarkan suara jeritan dan derita subjek-subjek demokrasi yang kerap tidak didengarkan oleh wakilnya di parlemen. Dunia hidup masyarakat mengisahkan ketidakadilan, pembangunan yang tidak merata, perlakuan diskriminatif. Kebanyakan masyarakat desa benteng tado hanya mengandalkan lampu pelita di malam hari, menemani anak-anak dalam belajar. Fenomena kehidupan masyarakat demikian bagaikan cerita dogeng yang diakibatkan oleh sistem demokrasi yang tidak demokratis. Masyarakat yang *voiceless*. Oleh karena itu pokok persoalan yang dibahas dalam penelitian ini menyangkut dua hal yakni. Apa yang masyarakat desa Benteng Tado pahami mengenai demokrasi politik? Apakah keterlibatan masyarakat desa Benteng Tado dalam pesta demokrasi rakyat (pemilu anggota legislatif), telah mengantar masyarakat Benteng Tado

dalam pertumbuhan dan kesejahteraan sosio-ekonomi? Pertanyaan pertama berhubungan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap demokrasi politik. Terutama pemahaman dasar masyarakat desa Benteng Tado dalam memahami demokrasi politik.

Pertanyaan kedua berhubungan erat dengan pemahaman masyarakat mengenai peran timbal balik antara masyarakat desa Benteng Tado dengan wakil mereka di parlemen pasca pemilu. Hal ini juga berkaitan dengan peran calon legislatif yang mereka pilih terhadap kemajuan dan kesejahteraan bidang sosio-ekonomi. Apakah aspirasi mereka terjawab atau mendapat tanggapan positif dari perwakilan mereka di parlemen. Sebab kinerja anggota parlemen diukur melalui perhatiannya terhadap daerah atau masyarakat yang diwakilinya. Oleh karena itu masyarakat desa Benteng Tado perlu mengetahui kinerja DPR, sehingga menentukan langkah selanjutnya ketika pemilu berikutnya dilaksanakan.

Maka penelitian ini bertujuan menggali sedalam-dalamnya pemahaman masyarakat desa benteng tado mengenai demokrasi politik secara menyeluruh. Untuk memahami pemahaman masyarakat desa Benteng Tado mengenai demokrasi penelitian ini digali dengan pertama-tama melihat proses dan keterlibatan masyarakat desa Benteng Tado dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menghayati demokrasi. Pemilu dijadikan sebagai sebuah tolak ukur untuk menilai sejauh mana masyarakat memiliki pemahaman luas mengenai demokrasi politik. Keterlibatan di dalam pemilu tersebut sebagai momen keterlibatan masyarakat dalam menentukan wakilnya di parlemen dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi. Apakah masyarakat yang terlibat dalam pemilu mempunyai gambaran tentang apa yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun pasca pemilu, terutama kesejahteraan hidup mereka. Pokok persoalan ini berkaitan dengan manfaat memilih wakil rakyat di parlemen dan peran anggota parlemen dalam mengusahakan hidup yang berkeadilan dalam bidang sosial ekonomi.

Penelitian tentang peran masyarakat dalam pesta demokrasi telah bayak dilakukan. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 dikatakan, “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang” (*Undang-Undang Hasil*

Amendemen 2002, n.d.). Dengan kata lain, UUD 1945 secara tegas menjadi dasar pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat (Noviati, 2016). Namun pertanyaannya apa itu demokrasi? Berdasarkan hal tersebut Abraham Lincoln (1809-1865) memberikan pemahaman yang cukup memadai mengenai demokrasi. Menurut Abraham Lincoln demokrasi mencakup tiga unsur, yaitu *government of the people* (1), *by the people* (2), *for the people* (3). Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Pamungkas & Arifin, 2019).

Penelitian yang sama pernah dikerjakan oleh Kurniawan (2020) yang mengartikulasikan demokrasi sebagai ruang yang menyediakan bagi setiap individu yang ada di masyarakat untuk mengekspresikan kebebasan berpolitik secara bebas dan bertanggungjawab (Kurniawan, 2018). Kusmanto (2014) dalam penelitiannya tentang demokrasi menunjukkan bahwa perkembangan dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik di Indonesia seperti kebebasan berpendapat, kebebasan mendapatkan penghidupan yang layak dan kebebasan memperoleh akses pendidikan dapat dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dalam setiap kegiatan rapat pembangunan desa, setiap warga diberikan kebebasan memberi aspirasi atau menerima kritikan. Warga memiliki kebebasan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keahliannya, begitu juga dalam memperoleh askes pendidikan, semua warga selalu mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan warga yang lain (Kusmanto, 2014).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Liando (2016) tentang demokrasi juga menarik untuk disimak. Liando menemukan bahwa di kabupaten Minahasa pemilu dan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan calon wakil presiden di tahun 2014 terdapat sebuah dinamika (Liando, 2016). Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik yang masih digerakkan oleh uang menjadikan arena demokrasi Indonesia sebagai sebuah rimba politik (Liando, 2016). Siapa yang banyak uang dialah yang berhak menang. Tetapi hal itu tidak menjadi jaminan bagi kemajuan suatu bangsa ke depan (Fikri, 2018). Pendidikan politik (sosialisai) sangat penting dalam situasi demikian. Partai politik dan penyelenggara pemilu memiliki perannya. Tujuannya adalah membangun pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi untuk memilih pemimpin yang akan mengelola

pemerintahan maupun parlemen (Triono, 2017).

Usfinit *at. al* (2015) dalam penelitiannya menunjukan bahwa bentuk partisipasi politik masyarakat kota Malang terbagi atas pemberian suara, kampanye, mencari jabatan politik, dan partisipasi dalam pemungutan suara (Usfinit, 2014). Demikian juga Mappakalu (2015) dalam penelitiannya memperluas penegasan demokrasi dengan mengatakan bahwa parsipasi politik masyarakat bukan hanya ikut memberikan suara pada setiap Pemilu/Pilkada, tetapi partisipasi politik masyarakat dapat dilihat pada keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan. Tidak hanya itu, tetapi juga peluang untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan (implementasi) dan pengawasan kebijaksanaan atau keputusan yang sudah ditetapkan (Mappakalu, 2009).

Hal yang sama juga yang diteliti oleh Basuki (2020) yang memberikan sebuah penegasan bahwa rakyat atau warga negara bukan hanya sebagai obyek, melainkan subyek dan ikut memainkan peranan penting dalam kehidupan kenegaraan (Basuki, 2020). Untuk itu keberadaan lembaga perwakilan merupakan suatu kemutlakan yang harus dipenuhi dalam negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat (Wibowo et al., 2020). Meskipun demokrasi politik menyoroti peranserta masyarakat dalam kebebasan berpolitik, Saleh memberikan sebuah peringatan dalam hasil penelitiannya bahwa tidak ada demokrasi tanpa Partai Politik (Saleh, 2008). Keberadaan Partai Politik sejalan dengan munculnya pemikiran mengenai paham demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. Partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Oleh karena itu, kader-kader dipersiapkan oleh partai politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, studi ini meminati terutama dunia pemahaman masyarakat desa Benteng Tado terhadap demokrasi politik, terutama pemahamannya terhadap pemilihan anggota legislatif serta pengaruh keterlibatan masyarakat desa Benteng Todo dalam pemilu terhadap kesejahteraan hidup sosial dan ekonominya. Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuesioner dalam

bentuk google form. Penelitian berlangsung sejak 17 Oktober hingga 3 November 2020.

Proses penelitian dilaksanakan melalui analisis kritis menurut filsafat politik Armada Riyanto. Konsep politik Armada Riyanto mengenai politik sebagai tata kelola hidup keseharian karenanya menjadi fondasi teoretis dalam mengkritisi fenomena keterlibatan dan partisipasi masyarakat desa Benteng Tado dalam pemilu. Sedangkan dinamika pemahaman masyarakat desa Benteng Tado terhadap demokrasi, pemilu, dan pengaruh keterlibatannya dalam pemilu terhadap kesejahteraan sosioekonomi menjadi data yang dikaji dan dianalisi. Sekaligus sebagai bahan utama uraian ini. Poin-poin yang diolah, dianalisis, dan dikritisi ialah pertama, pemahaman masyarakat Benteng Tado mengenai demokrasi; kedua, pemahaman mengenai pemilu dalam kaitannya dengan demokrasi; ketiga, pengaruh keterlibatan masyarakat desa benteng Tado dalam pemilu dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi, terutama pasca-pemilu. Data-data penelitian akan diolah berdasarkan tiga poin pokok tersebut.

Hasil Dan Pembahasan

Sekilas Informasi Mengenai Desa Benteng Tado

Desa Benteng Tado terletak di Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Desa ini mencakup beberapa kampung, yaitu Bea Raja, Wae Tingang, Pau, Lengkong Tarung, Ules, Pie, Tunge. Di desa ini hanya memiliki satu lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ules. Sekolah ini terletak di titik sentral, yaitu kampung Lengkong Tarung (sebuah kampung yang masih sangat baru yang terbentuk sejak sekolah SDN Ules mulai didirikan di tempat ini).

Akses jalan raya beraspal (Tunge-Pie-Ules, Pie-Lengkong Tarung, Ules-Lengkong Tarung). Beberapa kampung belum memiliki akses jalan beraspal, Ules-Bea Raja. Lebih lagi, Pau-Wae Tingang-Bea Raja sama sekali belum meliki akses jalan yang bisa dilalaui kendaraan roda dua dan roda empat. Akses PLN belum masuk ke desa ini (per Oktober 2020). Saya yakin, situasi-situasi serupa dialami oleh berbagai daerah yang tersebar di pelosok tanah air. Sungguh ironis! Mengingat bahwa akses-akses tersebut menyentuh langsung bidang sosio-ekonomi masyarakat. Halnya jelas bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah seperti ini

sangat lambat. Bahkan tidak menunjukkan pertumbuhan apa-apa.

Secara ekonomi, masyarakat desa ini terdiri masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Secara umum berpencaharian bertani-bercocok tanam. Selain itu cukup banyak juga guru swasta dan negeri. Ada beberapa juga pedagang/pengusaha kecil. Anak-anak sekolah dari tingkat SMP-SMA tergolong banyak. Mahasiswa-mahasiswi terhitung banyak juga dari desa ini. Ada yang kuliah di Ruteng-Flores, Bali, Makassar, dan Jawa. Dalam hal ini kesadaran untuk mengenyam pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi/universitas semakin hari semakin bertumbuh. Walaupun diakui bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan formal baru mendapat perhatian serius sekitar sepuluh tahun terakhir.

Data Hasil Penelitian

Berikut hasil penelitian Kuantitatif dengan menggunakan *google form*. Penelitian ini berlangsung selama hampir sebulan, sejak 17 Oktober 2020-3 November 2020. Responden penelitian dengan *google form* ini adalah masyarakat desa Benteng Tado. Responden berjumlah 108 orang dari berbagai kategori usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan status pernikahan. Yang ditampilkan dalam uraian ini adalah kategori status hidup, seperti tampak dalam diagram lingkaran berikut ini. Bisa dilihat bahawa responden terbanyak adalah pekerja muda atau karyawan muda, yaitu 35, 2%. Berikut, menyusul ibu atau bapak rumah tangga (petani), yaitu 30,6% dan selanjutnya mahasiswa-mahasiswi, yaitu 23,1%. Kategori status hidup ini akan berguna dalam menganalisis jawaban atas pernyataan-pernyataan kuesioner.

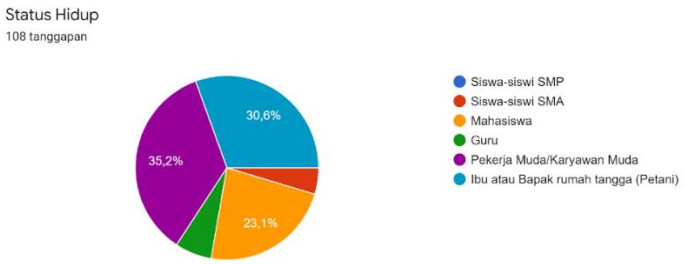

Ada 6 pernyataan yang diwajibkan untuk dijawab oleh responden. Jawaban direntang dengan menggunakan skala linear dari angka 1-5. 1: sangat tidak setuju dan 5: sangat setuju. 2: tidak setuju, 3: kurang setuju, dan 4: setuju. Berikut ditampilkan dalam bentuk diagram.

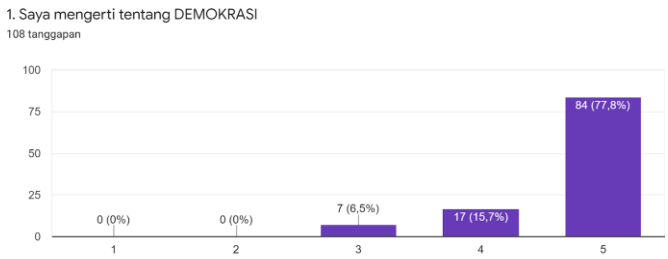

Pemahaman terhadap demokrasi pada tingkat pribadi memperlihatkan sesuatu yang sangat bagus. Sebagian besar (77,8%) memahami demokrasi. Ini merupakan sebuah awal yang bagus. Pemahaman ini, dirasa perlu diperdalam dan diuji lebih lanjut dengan menyodorkan pemilihan umum (atau pemilu) sebagai salah satu bagian dari keterlibatan masyarakat dalam demokrasi politik di tanah air.

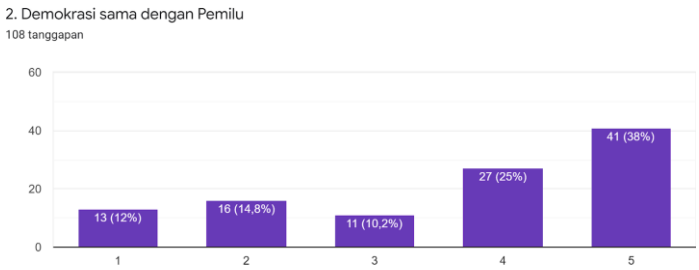

Diagram dari jawaban terhadap pernyataan kedua menampilkan sebuah dinamika. Kecenderungan memahami demokrasi sama dengan pemilu mendominasi, yaitu 38% dari 108 responden (41 0rang). Artinya, mereka sangat setuju bahwa demokrasi sama dengan pemilu. Di samping itu 25 % menjawab setuju. Artinya, pemehaman mereka tidak jauh berbeda dengan yang menjawab sangat setuju. Pernyataan berikutnya lebih konkret, karena berkaitan dengan wakil mereka di parlemen (DPR) yang mereka pilih melalui pemilihan umum.

Diagram tersebut menampilkan sebuah situasi riil sebagai konsekuensi lanjut dari pemilihan umum. Menarik bahwa 50,9% masyarakat sangat tidak setuju bahwa anggota DPR memperhatikan pembangunan di desa Benteng Tado. Menyusul, 24,1% tidak setuju.

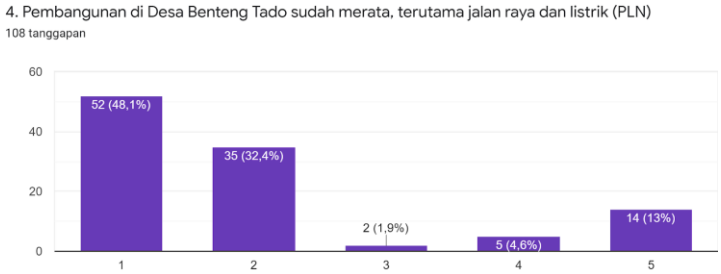

Pernyataan keempat lebih mengerucut lagi pada pembangunan infrastruktur, yaitu akses jalan raya dan listrik. Sebagian besar, yaitu 48,1% (52 orang) mengafirmasi bahwa pembangunan di desa benteng tado belum merata. Menyusul berikutnya 32,4% yang tidak setuju bahwa pembangunan tersebut sudah merata. Dari penyataan keempat tersebut, responden dibawa kepada pengamatan umum mengenai dinamika kehidupan sosial ekonomi.

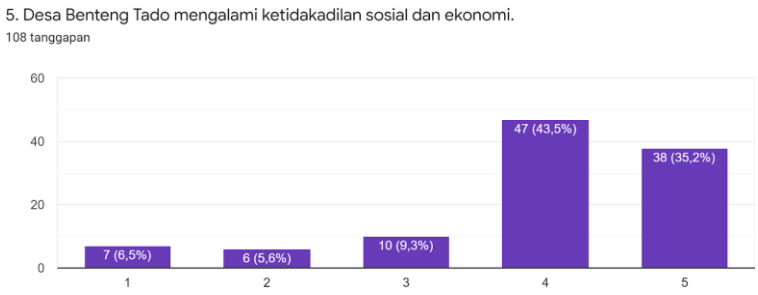

Di sini, lagi lagi memperlihatkan konsistensi yang jelas dari jawaban para responden. 35,25 responden mengafirmasi bahwa desa Benteng Tado mengalami ketidakadilan sosial dan ekonomi. Walaupun bukan persentase tertinggi, setidaknya kelompok yang menjawab setuju mengambil posisi tertinggi, yaitu 43,5%. Artinya, jawaban mereka tidak jauh berbeda dengan kelompok yang menjawab sangat setuju. Untuk menggali lebih jauh keterlibatan masyarakat dalam pemilu, maka dianggap perlu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat berpendapat mengenai tujuan dari pemilu itu sendiri ketika dikaitkan dengan kepentingan siapa di baliknya.

Jawaban terhadap pernyataan keenam tersebut berada pada wilayah setuju (42,3%) dan sangat setuju (41,2%). Artinya, secara umum masyarakat berpendapat dan mengalami bahwa pemilu yang seringkali mereka ikuti dimanfaatkan untuk kepentingan pengusaha/pemerintah daripada kesejahteraan masyarakat.

Demokrasi Politik Menurut Armada Riyanto

Mengejutkan bahwa pemahaman masyarakat desa Benteng Tado mengenai demokrasi, masih sangat sempit. Demokrasi politik tentu saja tidak sama dengan pemilu. Pemahaman Armada Riyanto mengenai politik sebagai tata kelola hidup bersama yang begitu ditekankan kiranya menjadi titik pijak untuk memperbaharui cara pandang mengenai demokrasi politik. Demokrasi itu keseluruhan keterlibatan masyarakat dalam membangun tata kelola kehidupan bersama, dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, adil, sejahtera, setara di hadapan hukum. Semua unsur itu menjadi bagian utuh dari demokrasi politik. Armada Riyanto (2014) mengatakan politik itu memiliki cakupan kedalaman pengalaman hidup manusia sebab di dalamnya dikelola kebudayaan pendidikan kecerdasan (*well being*) kesejahteraan, relasi personal-komuniter, tata religius, dunia ruang-lingkup kehidupan, tata kelola sumber daya alam dan manusia, komunikasi interpersonal, hukum-sistem peradilan, sejarah, peradaban manusiawi, sastra, retorika, aneka nilai kebersamaan, *kegotong-royongan,* solidaritas, dan

rupa-rupa kepentingan peristiwa hidup keseharian (E. A. Riyanto, 2014).

Demokrasi politik, dengan sendirinya mencakup semua bidang tersebut. Artinya, masyarakat mempunyai hak untuk menikmati politik yang mengedepankan nilai-nilai kehidupan keseharian. Masyarakat bukanlah istrumen politik, akan tetapi pelaku sekaligus sebagai tujuan dalam dirinya. Armada Riyanto menegaskan mengenai cakupan politik demikian, "Dalam politik terdapat perkara hukum, pemerintahan, negara, pajak, partai politik, kebijakan publik, pendidikan, pertahanan, ekonomi, sumber daya alam dan manusia, ideologi, konsep keadilan, dan segala sesuatu yang mengatakan tata hidup bersama" (A. Riyanto, 2018a). Singkat kata, demokrasi politik tidak pernah terkhusus pada satu dua bidang. Ketika demokrasi ditonjolkan hanya dalam satu bidang, maka makna dan cakupan politik menjadi pincang. Kalau mau menilai sejauh mana masyarakat kita terlibat dalam berpolitik, maka wilayah penggaliannya ditemukan dalam cakupan-cakupan yang diurai Riyanto tersebut.

Demokrasi memiliki tujuan yang bukan hanya menitikberatkan pada struktur organisasi yang rapi, melainkan pertumbuhan warga negara dalam mencapai keinginannya masing-masing. Setiap warga negara diberikan hak untuk mengekspresikan suaranya dengan bebas dan bertanggung jawab. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama untuk berlaku dan diperlakukan secara demokratis dalam sebuah negara (A. Riyanto, 2018b).

Masyarakat desa Benteng Tado, dalam banyak aspek, hilang (dihilangkan!) dan kurang diperhitungkan dalam narasi demokrasi politik di negara ini. Mereka, dalam pemahaman Riyanto, ada di wilayah "*Liyan*" dalam tatapolitik dan mega societas Indonesia. Mereka teralienasi oleh sistem politik yang memberi ruang sebebas-bebasnya bagi kepentingan para penguasa, para politikus, elit politik, kelompok mayoritas. Mereka adalah orang ketiga yang tersisihkan. Mereka menjadi orang asing dalam pengalaman kesehariannya. Mereka tidak menjadi tuan atas pengalaman hidupnya sendiri. Mereka tersisih oleh kebijakan pembangunan yang tidak merata (A. Riyanto, 2013). Singkat kata, mereka belum mempunyai tempat dalam kebijakan politik tanah air. Mereka adalah orang ketiga dalam societas.

Orang ketiga adalah dia/mereka yang tersisih. Suku-suku masyarakat

yang ada di hutan-hutan atau di pinggirannya di banyak wilayah di Indonesia merupakan kelompok warga negara yang tersisih. Menurut Armada Riyanto (2013) orang ketiga dalam societas adalah mereka yang tidak menjadi tuan atas pengalaman hidupnya sendiri, dalam konteks ini ketika masyarakat tersisih oleh kebijakan pembangunan. Masyarakat benar-benar menjadi orang ketiga dalam societas, yakni ketika layanan kesehatan pada level fundamental tidak dapat mereka nikmati, mereka jelas tergencet dari tata adil kehidupan. Ketika, fasilitas dasar seperti listrik, air, dan udara yang baik untuk hidup menjadi barang yang mahal, mereka menjadi kelompok orang ketiga. Sebagai orang ketiga, mereka "voiceless". Tidak ada posibilitas partisipasi kehidupan bagi mereka. Mereka tidak berada di wilayah komunikasi pengambilan keputusan. Kenyataan semacam ini jelas tidak mengindikasikan struktur gramatika kehidupan yang manusiawi (A. Riyanto, 2013).

Situasi dan kondisi masyarakat yang "*voiceless*" dapat digambarkan seperti seseorang yang sedang menunggu kedatangan sahabatnya. Ada janji yang telah disepakati dan masing-masing berusaha menepatinya. Namun apa yang terjadi? Waktu demi waktu berlalu tidak ada tanda-tanda kedatangannya. Setiap orang yang lewat dan berlalu dikira sahabatnya. Begitulah waktu hidupnya berlalu tanpa kabar jelas dari sahabatnya. Janji tinggal janji. Politik itu kadang-kadang menarasikan pengkhianatan terhadap masyarakat kecil. Janji-janji politik yang digembar-gemborkan waktu kampanye menjadi racun yang melumpuhkan posibilitas kesejahteraan masyarakat. Jelas sekali bahwa masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk menentukan sikap politik mereka. Mereka tertekan oleh pengalaman hidup mereka sendiri yang setiap kali dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan pribadi atau kelompok tertentu (A. Riyanto, 2014).

Demokrasi politik itu menyoal keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesetaraan dihadapan hukum, kesejahteraan sosial, mendapatkan akses yang mudah dalam bidang ekonomi, kebebasan untuk beragama dan menjalankan agamanya. Demokrasi politik, singkat kata, menyoal keseharian masyarakat dalam keterlibatannya untuk memperjuangkan tata kelola hidup bersama yang lebih baik lebih adil (A. Riyanto, 2020). Kalau demokrasi politik di reduksi pada perkara keterlibatan dalam pesta

demokrasi rakyat, ini sungguh-sungguh sebuah ketersesatan. Dan ini adalah sebuah penindasan baru dalam tata demokrasi. Demokrasi lebih sering dimaknai secara *ngawur*. Demokrasi, lalu, dipahami sebagai kepentingan elit politik atau pemerintah.

Kerap kali, pasca pemilu masyarakat perlahan-lahan hilang dari panggung demokrasi politik. Keterlibatan mereka dalam demokrasi politik bersifat temporal, karena cenderung saat pemilu saja. Demokrasi pasca pemilu seharusnya menampilkan prisip dialogal yang tidak bisa diabaikan. Dialogal karena menyoal keterlibatan anggota legislatif dalam mengimplementasikan janji-janjinya dan peran masyarakat dalam mengontrol dan memastikan bahwa wakilnya di parlemen melaksanakan perannya (Adon, 2021). Masyarakat tidak dilepaskan setelah pemiluhan umum dan menanti pemilu berikutnya. Demokarasi kita bukan demokrasi abal-abalan. Demokrasi politik perlu dipahami dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat dalam membangun tata politik keseharian. Wakil mereka menjadi corong aspirasinya yang disampaikan dalam sidang parlemen. Dan memastikan konstituennya di daerah mendapat perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan sosio-ekonomi.

Masyarakat belum memahami bahwa kesejahteraan hidup mereka sebagai bangsa Indonesia merupakan bagian dari demokrasi (Adon, 2018). Pemahaman masyarakat desa Benteng Tado hanya sampai pada pesta demokrasi rakyat dalam berbagai tingkat dan bentuknya: pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilu Caleg dalam berbagai tingkatnya, pemilihan DPD, pemilihan Bupati-wakil bupati (kepala daerah), pemilihan kepala desa. Hanya sebatas itu. Tentu saja ini bukan kesalahan masyarakat. Karena masyarakat kecil kerap hanya dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas politik demikian. Di luar itu, bagaimana hubungan semuanya dengan kesejahteraan hidup mereka tidak mendapat perhatian. Mereka hanya sampai pada pemahaman bahwa mereka menyumbangkan suara dalam pemilu. Itulah bukti keterlibatan mereka dalam tata politik. Selesai urusan! Tidak mengherankan kalau masyarakat di pedalaman Indonesia tetap mengalami keterpurukan. Akses-akses yang memajukan perekonomian mereka tidak diperhatikan.

Keterlibatan Masyarakat Desa Benteng Tado dalam Pemilihan umum (Pemilu)

Jika politik sekadar sebuah pertarungan kekuasaan dan kepentingan sudah semestinya politik itu dicabut dari posibilitas terciptanya peradaban tata manusiawi. Penegasan yang sama berlaku dalam pesta demorasi rakyat, khususnya pemilihan anggota Legislatif (E. A. Riyanto, 2014). Sebab pemilu anggota legislatif lebih ditampilkan sebagai pertarungan kekuasaan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Pemilu tidak memberi perhatian kepada masyarakat, tetapi kepada caleg dan kepentingannya. Kepentingan masyarakatnya? Urusan belakangan! Demikianlah jargon yang kerapkali mewarnai pesta demokrasi di tanah air.

Masyarakat Desa Benteng Tado belum mengalami demokrasi politik yang sesungguhnya di negara ini. Kalau demokrasi politik itu diidentikkan dengan keterlibatan masyarakat dalam pesta demokrasi rakyat maka terjadi apa yang namanya penyempitan pemahaman terhadap demokrasi. Apa yang terjadi sesungguhnya masih jauh dari harapan apa yang disebut sebagai demokrasi. Di berbagai tempat akses infrastruktur jalan dan listrik masih belum memadai bahkan tidak ada sama sekali. Di pedalaman Kalimantan Barat hal yang sama juga terjadi di mana masyarakat mengalami kesulitan untuk akses perekonomian karena infrastruktur jalan tidak ada. Masyarakat, dalam berbagai hal, kadang-kadang menjadi korban dari para penguasa, elit politik, kelompok-kelompok radikal fundamentalis yang ingin menghancurkan negara ini. Bebagai demonstrasi besar-besaran di negara ini, misalnya, bagaikan kisah “dongeng” sebelum tidur di telinga masyarakat yang masih mengalami keterpurukan dalam bidang sosio-ekonomi. Demikianpun di telinga masyarakat desa Benteng Tado. Dongeng? Ini adalah sebuah sindiran dan pukulan berat terhadap pemerintah.

Pemilu seringkali menjadi tolok ukur keterlibatan masyarakat dalam demokrasi. Padahal, pemilu merupakan kesempatan bagi elit politik untuk mencari panggung. Bukan untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat desa benteng tado bukanlah masyarakat yang absen dari setiap pemilu di negara ini dalam segala tingkatnya. keterlibatan mereka untuk ikut membangun negara ini tidak diragukan. akan tetapi apa yang mereka peroleh? di sini tentu saja tidak memaksudkan bahwa keterlibatan mereka harus diganjari. sebab halnya sudah merupakan hak mereka untuk

diperhatikan oleh negara. dalam hal inilah mereka dilupakan. keterlibatan mereka dalam berpolitik tidak dibarengi perhatian para penguasa terhadap kesejahteraan hidup mereka.

Politik yang direduksi pada pertarungan kekuasaan dan kepentingan menjauhkan masyarakat dari keterlibatannya dalam kehidupan societas. Societas merupakan locus penghayatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana letak pengalaman masyarakat desa Benteng tado dalam demokrasi politik di tanah air? Harus diakui bahwa pengalaman mereka acap kali diabaikan dalam tata demokrasi. Pengalaman mereka "tidak menarik", sehingga patut diabaikan.

Kesejahteraan Sosio-ekonomi Masyarakat Desa Benteng Tado

Keterpurukan societas terjadi oleh berbagai hal, seperti kesejahteraan ekonomi dan sosial yang tidak merata (A. Riyanto, 2020). Penegasan Riyanto tersebut meringkas pengalaman masyarakat desa Benteng Tado. Desa Benteng Tado, sampai saat ini, belum tersentuh oleh pembangunan yang merata. Ironis, karena di samping menggagas apa yang disebut sebagai keadilan sosial, di sisi lain begitu banyak masyarakat tidak diperhatikan dalam pengalaman kesehariannya. Tidak diberi akses yang mudah.

Masyarakat hanya sarana untuk meraih apa yang menjadi kepentingan caleg. Ristian mengamini bahwa demokrasi yang selama ini diidam-idamkan banyak rakyat untuk mencapai satu kesejahteraan, ternyata tidak lebih dari sekedar "mainan" yang dipermain oleh elit politik (Ristian, 2016). Masyarakat desa Benteng Tado mengalami kenyataan ini bertahun-tahun hingga saat ini (per oktober 2020). Mereka masih berjuang untuk menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan secara sosioekonomi. Sosial, karena mereka menjadi societas yang diabaikan. Ekonomi, karena infrastruktur standar seperi akses jalan raya dan listrik masih jauh dari harapan. Jalan beraspal yang sudah rusak. PLN belum masuk sama sekali ke daerah ini. Begitulah narasi masyarakat kecil yang teralienasi dari tata politik.

Tidak ada beritanya mengenai desa ini. Tidak ada! Janji untuk akses listrik, misalnya, sudah sejak lama sekali dijanjikan. Sampai saat ini belum ada realisasinya. Wacananya mungkin ada. Dibicarakan setiap tahun. Dijanjikan terus menerus. Tetapi realisasinya belum. Demokrasi seperti apa yang mau digagas dalam konteks demikian? Negara

ini sudah lama sekali memberikan ruang kebebasan kepada masyarakat. Ruang untuk menyampaikan pendapat. Ruang untuk diberlakukan seadil-adilnya. Ternyata belum mereta. Masyarakat kecil masih mengalami ketidakadilan secara sosial dan ekonomi. Situasi serupa, tentu saja, tidak hanya dialami oleh desa Benteng Tado. Masih banyak daerah lain di pedalaman Flores, NTT mengalami nasib yang sama.

Situasi ini jika dibandingkan dengan fenomena menjelang pemilihan umum: pemilihan kepala daerah, legislatif, dan presiden wakil presiden. Semua masyarakat didatangi dan didata untuk ikut dalam pemilihan umum. Bahkan orang gila dan orang yang sudah meninggal pun didata semuanya. Dan atas nama demokrasi keterlibatan masyarakat dalam pemilu dilihat representatif untuk mengatakan partisipasi mereka dalam urusan politik. Itulah bukti pemahaman yang sempit terhadap demokrasi. Sangat dangkal. Kebalikannya (dari pendataan jelang pemilu) ketika bantuan dari pemerintah mau disalurkan. Apa yang terjadi? Tidak semua orang didata. Tidak ada perlakuan seperti jelang pemilihan umum. Hanya orang-orang tertentu. Kadang-kadang, dengan berbagai alasan yang dicari-cari, tidak tepat sasaran. Bantuan yang seharusnya untuk orang miskin malah diterima oleh orang kaya. Karena apa? Sistem pemerintahan tingkat bahwa yang buruk dan korup. Pada tingkat desa mulai ada kongkalingkong hanya memberi bantuan kepada golongan sendiri, keluarga sendiri, tanpa sungguh-sungguh objektif melihat situasi masyarakat.

Ini adalah situasi demokrasi politik kita demokrasi politik di negara kita ini. Demokrasi yang pincang. Masyarakat dibatasi dalam keterlibatannya untuk mengurus hal-hal politik. Lihat saja para anggota dewan kita. Tidak jarang (bahkan paling banyak) mereka baru hadir menjelang pemilihan umum. Setelah itu mereka di mana? Tidak ada. Hilang. Apa yang dijanjikan tinggal janji. Sayangnya masyarakat tetap memegang janji yang tanpa realisasi. Tentu saja sangat ironis. Di mana posisi masyarakat kecil di dalam nilai indeks ekonomi yang semakin meningkat? Mereka tidak berada di mana-mana. Karena narasi mereka adalah narasi kehidupan yang selalu berjuang antara hidup dan mati. Berjuang agar bisa bertahan hidup di tengah garangnya sistem yang menindas dan menegasikan kepentingannya. Sistem yang tanpa ampun menindas kaum lemah. Hal tersebut mau

menunjukkan sebuah kenyataan bahwa demokrasi yang berjalan di tingkat lokal gagal untuk mensejahterakan dan membalikkan keadaan seperti yang diharapkan (A. Riyanto, 2018a).

Demokrasi politik tidak berhenti pada keterlibatan masyarakat dalam persta demokrasi rakyat, pemilihan caleg. Justru yang perlu mendapat perhatian adalah demokrasi pasca pemilu. Demokrasi itu mengurusi dimensi politik kehidupan harian masyarakat: sosio-ekonomi dalam hal ini. Perjuangan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya merupakan bagian terpenting dalam demokrasi politik. Caleg yang mereka pilih mendapat peran yang sangat penting. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan caleg sejauh ini belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya kesejahteraan sosio-ekonomi masyarakat. Masyarakat telah menerima banyak janji dari calon mereka, akan tetapi realisasinya jauh dari harapan.

Dampak Keterlibatan Masyarakat Desa Benteng Tado dalam Pemilu Bagi Kesejahteraan Sosio-ekonomi

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 dikatakan, "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Dapat dipahami di sini bahwa UUD 1945 secara tegas mendasari pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat. Apa itu demokrasi? Salah satu pemahaman yang sangat terkenal dari Abraham Lincoln (1809-1865) patut disebutkan di sini mengenai demokrasi. Demokrasi mencakup tiga unsur, yaitu *government of the people* (1), *by the people* (2), *for the people* (3). Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat dengan sendirinya bukan sebagai ketentuan hukum, tetapi hakikat yang menentukan keberlangsungan sebuah negara demokrasi.

Demokrasi (dalam) politik dapat dikatakan sebagai ruang keterlibatan (kebebasan) masyarakat dalam tata kelola kehidupan sehari-hari. Mayarakat mempunyai peran dalam menentukan sendiri hidupnya dan terlibat dalam menentukan peziarahan societasnya. Kurniawan mengartikulasikannya demikian, bahwa demokrasi menyediakan ruang untuk setiap individu yang ada di masyarakat dalam rangka mengekspresikan kebebasan berpolitik secara bebas dan bertanggungjawab (Kurniawan, 2018). Itulah demokrasi politik. Masyarakat

tidak menjadi penonton dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi merupakan ruang yang diberikan kepada individu-individu. Sebuah ruang kebebasan.

Kusmanto dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perkembangan dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik seperti kebebasan berpendapat, kebebasan mendapatkan penghidupan yang layak dan kebebasan memperoleh akses pendidikan dapat dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dalam setiap kegiatan rapat pembangunan desa, setiap warga diberikan kebebasan memberi aspirasi atau menerima kritikan. Warga memiliki kebebasan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keahliannya, begitu juga dalam memperoleh askes pendidikan, semua warga selalu mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan warga yang lain (Kusmanto, 2014). Hasil penelitian tersebut tentu saja sangat menggembirakan. Masyarakat paham bagaimana terlibat dalam menjalankan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Paham demokrasi politik. Akan tetapi, apa yang temukan oleh Kusmanto ini tidak representatif untuk menunjukkan pertisipasi masyarakat dalam demokrasi politik di daerah-daerah pelosok tanah air. Kelemahan dari penelitian ini adalah mengeneralisasi keterlibatan masyarakat dalam memahami dan menghayati demokrasi politik di tanah air. *Locus* yang berbeda tentu saja mempunyai konteks yang berbeda pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Liando (2016), di Sampin itu, menarik untuk disimak. Dia menemukan bahwa di kabupaten Minahasa pemilu dan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan calon wakil presiden di tahun 2014 terdapat sebuah dinamika. Tingkat partisipasi politik masyarakat sangat dinamis. Ada persoalan berkaitan dengan motivasi masyarakat. Apa yang menjadi faktor pendorong masyarakat untuk terlibat dalam pemilu? Sebagian besar masyarakat mengakui bahwa ia memilih didorong oleh faktor transaksi dan unsur kedekatan secara emosional. Visi dan misi calon bukan merupakan ukuran dalam memilih. Ada ketegangan yang serius. Motivasi yang tidak murni dan kriteria calon yang dipilih tidak menjadi perhatian (Liando, 2016).

Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik yang masih digerakkan oleh uang menjadikan arena demokrasi Indonesia sebagai sebuah rimba politik. Siapa yang banyak uang dialah yang

berhak menang. Tetapi hal itu tidak menjadi jaminan bagi kemajuan suatu bangsa ke depan (Fikri, 2018). Di sinilah demokrasi politik menampilkan sandiwara yang luar biasa. Masyarakat belum sampai melihat jauh ke depan: kesejahteraan mereka pasca-pemilu ditentukan pula oleh kualitas-kualitas calon yang mereka pilih. Pendidikan politik (sosialisai) sangat penting dalam situasi demikian. Partai politik dan penyelenggara pemilu memiliki perannya. Tujuannya adalah membangun pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi untuk memilih pemimpin yang akan mengelola pemerintahan maupun parlemen (Triono, 2017). Bukan asal memilih!

Tidak mengherankan kalau Munck (2016) menegaskan bahwa *democracy is about more than elections* (Munck, 2016). Hal ini perlu dipahami oleh masyarakat untuk membendungi praktik demokrasi yang tidak visioner. Demokrasi adalah keseluruhan tata politik keseharian. Konsep demokrasi merupakan fondasi pemahaman terhadap pemilihan umum (pemilu). Dengan kata lain, demokrasi merupakan latar belakang pelaksanaan pemilu (Labolo & Ilham, 2015). Pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Saleh, dengan tegas sekali mengatakan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi dan demokrasi politik. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan (Margiansyah, 2019). Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan (Saleh, 2008). Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.

Ketika Usfinit (2014) dalam penelitiannya bahwa bentuk partisipasi politik masyarakat kota Malang terbagi atas pemberian suara, kampanye, mencari jabatan politik, dan partisipasi dalam pemungutan suara, hal itu bukan sebuah keistimewaan (Usfinit, 2014). Ini tentu saja partisipasi mendasar yang bisa ditemukan di tempat-tempat lain. Bagaimana partisipasi masyarakat pasca pemilu untuk ikut ambil bagian dalam pengawasan dan pengajuan aspirasi? Partisipasi masyarakat desa Benteng Tado pun tidak diragukan. Hasil penelitian tersebut secara tersirat

menunjukkan bahwa masyarakat desa Benteng Tado mempunyai perhatian dalam tatakelola hidup berbangsa dan bernegara, hanya saja kesejahteraan mereka kurang diperhatikan.

Sebagaimana Munck (2016) memperluas penegasannya dengan mengatakan bahwa parsipasi politik masyarakat bukan hanya ikut memberikan suara pada setiap Pemilu/Pilkada, tetapi partisipasi politik masyarakat dapat dilihat pada keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan. Tidak hanya itu, tetapi juga peluang untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan (implementasi) dan pengawasan kebijaksanaan atau keputusan yang sudah ditetapkan (Munck, 2016). Mappakalu dalam hal ini menunjukkan pusat dan puncak partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik adalah apa yang terjadi pasca pemilu (Mappakalu, 2009). Pemilu hanya berlangsung sekali dalam lima tahun. Sedangkan perjuangan masyarakat untuk memperjuangkan kesejahteraan hidupnya tidak mengenal batas waktu.

Demokrasi politik, dengan sendirinya, menyoal keseharian masyarakat. Menyoal keterlibatannya dalam menciptakan keadilan, kestabilan ekonomi, pembangunan yang merata sampai ke pelosok-pelosok, sistem yang tidak mengabaikan masyarakat kecil. Ia juga menyoroti perlakuan yang sewajarnya terhadap semua golongan masyarakat tanpa terkecuali, sistem pemerintahan, keputusan-keputusan pemerintah yang tidak memihak kaum kapitalis, pemilik modal, tidak memihak mayoritas. Singkat kata, demokrasi politik itu kompleks. Apa yang dialami masyarakat desa Benteng Tado, justru sebaliknya. Mereka mengakui bahwa kesejahteraan hidup mereka lebih banyak tidak diperhatikan setelah mereka mempunyai wakilnya di parlemen. Belum labi diakui bahwa pemilu selama ini seringkali dimanfaatkan demi kepentingan elit politik atau pemerintah, bukan masyarakat kecil seperti masyarakat desa Benteng Tado.

Benarlah apa yang dikatakan Basuki dalam penelitiannya, rakyat atau warga negara bukan hanya sebagai obyek, melainkan subyek dan ikut memainkan peranan penting dalam kehidupan kenegaraan. Untuk itu keberadaan lembaga perwakilan merupakan suatu kemutlakan yang harus dipenuhi dalam negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat. keberadaan lembaga ini seharusnya mengakomodasi

aspirasi-aspisari rakyat agar mereka mengalami demokrasi yang sesungguhnya, bukan hanya pengakuan tetapi juga perlakuan terhadap mereka. Tidak mengherankan kalau Riyanto menyebut mereka sebagai "orang ketiga", artinya orang tanpa identitas yang disingkirkan dari tata politik keseharian.

Meskipun demokrasi politik menyoroti peranserta masyarakat dalam kebebasan berpolitik, Saleh memberikan sebuah peringatan dalam hasil penelitiannya bahwa tidak ada demokrasi tanpa Partai Politik (Saleh, 2008). Tentu saja demikian. Apa yang dituntut masyarakat desa Benteng Tado dalam menghayati demokrasi adalah bahwa anggota DPR yang mereka pilih harus juga menyadari bahwa mereka adalah wakil rakyat. Demokrasi perwakilan tidak memaksudkan bahwa kesejahteraan hidup masyarakat diwakilkan oleh wakil mereka. Kalau anggota dewan sejahtera, maka terwujudlah kesejahteraan hidup masyarakat. Sungguh ironis.

Kesimpulan

Demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat adalah sebuah sistem yang dapat diterima agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud. Di sana nini memang membutuhkan perjuangan, karena masyarakat tidak selalu memahami keterlibatannya dalam tatakelola hidup bersama di dalam societas, di dalam NKRI. Adanya pemilihan umum dalam berbagai tingkatnya membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap salah satu tugasnya dalam menentukan peziarahan bangsa ini secara institusional-konstitutif. Pemilu merupakan hanya merupakan salah satu sarana, tetapi sekaligus sangat penting dan fondasional. Pemilu menjadi salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan. Meskipun demikian masyarakat tidak terlibat langsung dalam mengambil keputusan, pemilihan umum dilakukan dalam rangka mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Pemilu hanya merupakan langkah awal bagi masyarakat, karena keterlibatannya pasca-pemilu tidak bisa diabaikan, dalam mewujudkan kesejahteraan hidup bersama.

Studi ini akhirnya menemukan bahwa, *pertama*, pemahaman

masyarakat desa Benteng tado terhadap demokrasi masih terbatas pada keterlibatan mereka dalam pemilihan umum. Mereka belum cukup memiliki pemahaman mengenai apa yang perlu mereka lakukan pasca pemilu sebagai masyarakat yang berdemokrasi. Tentu saja jauh dari pemahaman Armada Riyanto mengenai politik sebagai pengalaman keseharian. Lebih lagi karena sosialisasi tentang demokrasi kurang mendapat perhatian di daerah ini. Sosialisasi tentang bagaimana memberikan hak suara pada pemilu tentu saja bukan pemahaman demokrasi politik yang mendalam. Cita-cita demokrasi sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 2 UUD 1945 belum tercapai sepenuhnya. Motivasi masyarakat dalam pemilu, seperti juga diungkapkan Liando dalam pengalaman masyarakat Kabupaten Minahasa, tidak murni. Dalam banyak kesempatan, masyarakat digerakkan tanpa punya pendirian. Motivasi uang, misalnya, dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari urusan kesejahteraan hidupnya secara menyeluruh dan kontinyu.

Kedua, keterlibatan mereka dalam berbagai pemilu tidak memberi jaminan kepada mereka untuk mengalami demokrasi secara sosioekonomi. Dalam hal inilah mereka mengalami situasi teralienasi dari tata demokrasi keindonesiaan. Keterlibatan masyarakat desa Benteng Tado dalam pemilihan umum rupanya belum memberikan sumbangan harga bagi perkembangan perekonomiannya. Dalam pemahaman Riyanto, mereka masih berada di posisi "orang ketiga' dalam tata demokrasi politik tanah air. Masyarakat yang tidak memahami perannya dalam sistem demokrasi politik di negara ini kerap dimanfaatkan demi kepentingan-kepentingan penguasa politik, partai politik. Pemilihan umum memungkinkan apa yang diinginkan dan dicita-citakan semua pihak (societas) terakomodasi. Tujuannya adalah terwujudnya kehidupan yang lebih baik, bonum commune (kesejahteraan bersama). Inilah yang menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokrasi suatu bangsa.

Demokrasi politik tentu saja mempunyai dinamikanya. Sebuah negara yang telah memilih untuk menjadi negara demokratis tentu tak lepas dari masalah yang berkaitan dengan partai politik dan sistem pemilihan umumnya. Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi, sedangkan sistem pemilu merupakan mekanisme dalam melembagakan kekuasaan secara konstitusional. Akan tetapi, jangan

sampai masyarakat dipengaruhi sedemikian rupa sehingga memahami demokrasi itu hanya sebatas pada keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi rakyat atau pemilihan umum. Masyarakat tentu saja perlu pemahaman yang komprehensif mengenai apa yang disebut sebagai demokrasi. Demokrasi itu bukan perkara teori tetapi demokrasi itu merupakan pengalaman politik keseharian. Pengalaman keterlibatan masyarakat di dalam politik dan juga berkaitan dengan perhatian terhadap masyarakat oleh pemerintah.

Sejauh ini demokrasi politik masih merupakan cita-cita atau wacana karena dalam kenyataannya belum sungguh-sungguh menyentuh penghayatan kehidupan berbangsa dan bernegara dari masyarakat di pedalaman, dari masyarakat di Desa Benteng Tado. Bahkan dalam pesta demokrasi masyarakat tidak sungguh-sungguh demokrasi secara politik. Kebebasannya untuk berpolitik lebih cenderung digiring. Bukan kebebasan dari kesadaran sendiri. Bukan kebebasan personal, tetapi kebebasan yang diarahkan atau digiring untuk memilih calon ini atau itu itu. Celakanya, masyarakat lebih cenderung mau diarahkan kepada salah satu calon anggota legislatif. Mereka kerap dikondisikan sedemikian rupa supaya fanatik terhadap salah satu calon dan mengabaikan yang lain. Tanpa melihat kualitas-kualitas yang dimiliki oleh masing-masing kader. Tidak ada kemandirian dalam berdemokrasi, dalam berpolitik. Belum lagi kalau politik uang dimainkan, matilah demokrasi kita. Ketika masyarakat melihat uang, maka yang lainnya tidak jelas lagi. Yang jelas-jelas berada di hadapan mata sekarang adalah uang. Mereka tidak lagi berpikir bahwa siapa yang mereka pilih akan menentukan kehidupan mereka 5 tahun mendatang.

Daftar Pustaka

Adon, M. J. (2018). Partisipasi Gereja Protestan Dalam Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia. *Forum: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, *1*(47), 17–29. Seri Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

Adon, M. J. (2021). Mahasiswa sebagai Agent of Changes dalam Mewujudkan New Normal sebagai Politik Bonum Commune di Masa Pandemi dalam Tinjauan Filsafat Politik Armada Riyanto. *Sains Sosial Dan Humaniora*, *5*(1).

Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi.

Kosmik Hukum, *20*(2), 81. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321

Fikri, S. (2018). Politik Identitas dan dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal). *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, *18*(2), 167–181. https://doi.org/10.19109/tamaddun.v18i2.2701

Kurniawan, B. (2018). Politisasi Agama di tahun Politik : Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, *Vol. 12 No*(Januari-Juni), 133–154.

Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, *2*(1), 78–90.

Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Liando, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, *3*(2), 14–28. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/17190

Mappakalu, H. A. M. (2009). Partisipas Politik Masyarakat Memperkokoh Pelaksanaan Pilar Demokrasi. *Administrasita'*, *6*(1), 33–42.

Margiansyah, D. (2019). Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, *16*(1), 47. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.783

Munck, G. L. (2016). What is democracy? A reconceptualization of the quality of democracy. *Democratization*, *23*(1), 1–26. https://doi.org/10.1080/13510347.2014.918104

Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, *2*(10).

Pamungkas, A. D., & Arifin, R. (2019). Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *17*(9), 16–30.

Ristian, A. (2016). Demokrasi dan Kekuasaan Politik Calon Incumbent. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik DaeraH*, *1*(1), 189–202.

Riyanto, A. (2013). *Menjadi Mencintai: Berfilsafat Sehari-Hari*. Kanisius.

Riyanto, A. (2018a). *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Kanisius.

Riyanto, A. (2014). "Kebahagiaan" Itu Tidak Ada: Puisi-Puisi Auschwitz. In E. R. L. Tinambunan & K. Bala (Eds.), *Di mana Letak Kebahagiaan? Penderitaan Harta, Paradoksnya (Tinjauan Filosofis Teologis)*. STFT Widya Sasana Malang.

Riyanto, A. (2018b). Mendesain Riset Filosofis-Fenomenologis Dalam Rangka Mengembangkan "Berfilsafat Indonesia." In A. T. Raharso & Yustinus (Eds.), *Metodologi Riset Studi Filsafat Teologi* (pp. 113–142). Dioma Malang.

Riyanto, A. (2020). Persahabatan Merespon Tanda-Tanda Zaman (Analisis Historiografis Duc in Altum Kolaborasi STFT Widya Sasana). In M. S. F.X. Kurniawan & C. V. Setiawan (Eds.), *Kamu adalah Sahabatku* (Vol. 30, Issue 9, pp. 1–24). STFT Widya Sasana Malang 2020.

Riyanto, E. A. (2014). *Berfilsafat Politik* (5th ed.). Kanisius.

Saleh, Z. A. (2008). Demokrasi dan partai politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *5*(1), 56–80.

Triono. (2017). Pemilu Dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Agregasi*, *5*(2), 116–232.

Undang-Undang Hasil Amendemen 2002. (n.d.).

Usfinit, Y. (2014). Perspektif Partisipasi politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *3*(1), 38–45.

Wibowo, A. P., Djuyandi, Y., & Agustino, L. (2020). Peren Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Dalam Mentransformasikan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Civic Hukum*, *5*(2), 191–204.